

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini di jelaskan hasil dari penelitian tentang “Identifikasi Kesiapsiagaan warga sekolah dalam menghadapi bencana banjir di SMP Muhammadiyah 17 keduyung, kecamatan laren kabupaten lamongan ” dengan jumlah responden sebanyak 87 orang. Penelitian ini dilakukan pada tanggal 30 april 2018 sampai 4 Mei 2018. Data yang diperoleh akan disajikan dalam bentuk narasi, table. Penyajian data hasil penelitian dibagi menjadi 3 bagian yaitu: 1) Gambaran lokasi penelitian. 2) Data umum tentang karakteristik yaitu : tingkat pendidikan responden. 3) Data khusus menampilkan kesiapsiagaan warga sekolah tentang bencana, list tentang fasilitas dan sarana prasarana sekolah aman bencana, kesiapsiagaan pengetahuan warga sekolah terkait manajemen kebencanaan di sekolah,kesiapsiagaan tentang pendidikan pengurangan resiko bencana untuk sekolah aman bencana di SMP Muhammadiyah 17 keduyung kecamatan Laren, kabupaten lamongan.

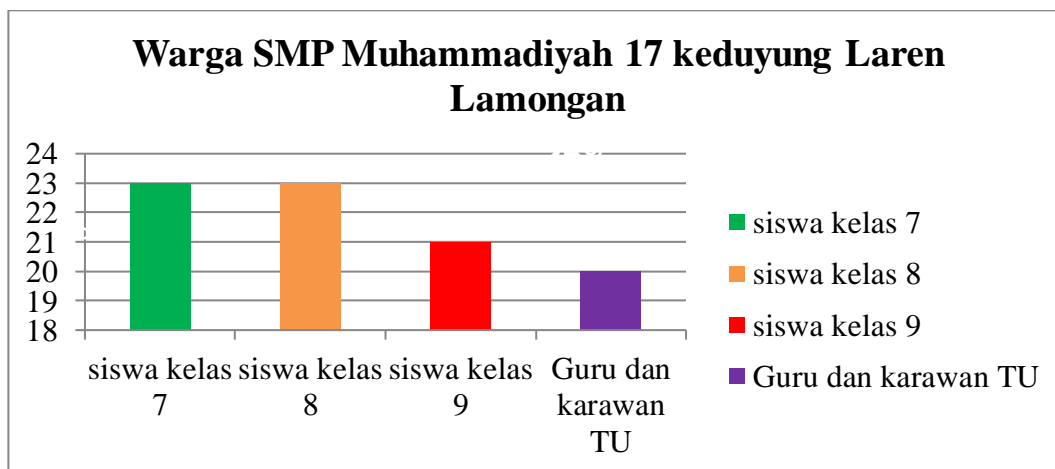
4.1 Gambaran Lokasi Penelitian

Penelitian di laksanakan di SMP Muhammadiyah 17 Dusun Keduyung kecamatan Laren.Kecamatan Laren yang berada di arah Barat Laut Kabupaten Lamongan. Kecamatan Laren berada 5 meter di atas permukaan air laut, berbatasan dengan Kecamatan Solokuro dan Kecamatan Brondong sebelah utara, Kecamatan karanggeneng sebelah selatan, Kabupaten Gresik sebelah timur, dan Kabupaten Tuban sebelah barat.

Kondisi gedung SMP Muhammadiyah 17 yang berlokasi di Desa Keduyung, Kecamatan Laren, Kabupaten Lamongan sangat mengkhawatirkan. Sekolah yang berlokasi di tepian Bengawan Solo itu Setiap Tahun menjadi langganan banjir dan terancam longsor oleh arus sungai Bengawan solo. Hal ini di per parah sejak di bangunnya Bendungan air (Babat Barage) yang berjarak radius 7Km dari Smp Muhammadiyah keduyung, karena pada saat bendungan ini di tutup maka kondisi tebing akan sangat curam yang memungkinkan potensi sangat tinggi terjadi longsor, dan apabila bendungan ini di buka laju air di belakang sekolah sangat deras pada saat musim hujan sangat besar berpotensi terjadi bencana banjir.

4.2 Data Umum

4.2.1 Karakteristik Pendidikan



Gambar 4.2.1 Distribusi responden berdasarkan pendidikan seluruh warga sekolah pada kesiapsiagaan warga sekolah dalam menghadapi bencana banjir di SMP Muhammadiyah 17 Keduyung Kecamatan laren Kabupaten Lamongan.

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa tingkat pendidikan dari responden kelas 7 sebanyak 23 siswa(26%) ,Kelas 8 sebanyak 23siswa(26%), Kelas 9 sebanyak 21 siswa(25%), Guru dan Karyawan sebanyak 20 orang (23%).

4.3 Data Khusus

4.3.1 Fasilitas dan Sarana prasarana sekolah aman bencana di SMP Muhammadiyah 17 Keduyung Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan

Tabel 4.3.1 Karkteristik Hasil Cek list pnegkajian failitas dan sarana pra sarana sekolah aman bencana di sekolah SMP Muhammadiyah 17 keduyung Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan

Fasilitas dan sarana pra sarana yang tersedia	Fasilitas dan sarana pra sarana yang tidak tersedia
<ol style="list-style-type: none"> 1. Bangunan lebih dari satu lantai 2. Terdapat akses jalur evakuasi untuk anak-anak 3. Kotak pertolongan pertama pada kecelakaan yang berisi peralatan dan obat untuk penanganan luka ataupun sakit 4. Titik evakuasi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelampung 2. Tabung alat pemadam kebakaran 3. Lokasi sekolah aman dari banjir 4. Perahu karet 5. Renovasi gedung setelah bencana 6. Sirine tanda bencana 7. Struktur atap gedung yang ringan seperti galvalum 8. Tandu untuk evakuasi korban 9. Pintu keluar membuka keluar 10. Pekerja pembangunan gedung yang sudah di beri pelatihan pembangunan gedung aman terhadap bencana 11. Bahan bangunan yang di sesuaikan dengan standard komposisi aman bencana yang tidak mudah hancur

Berdasarkan tabel di atas dari Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 15 point check list untuk fasilitas dan sarana prasarana sekolah aman bencana yang ada di SMP Muhammadiyah 17 Keduyung Kecamatan Laren, Kabupaten Lamongan, tersedia 4 poin atau (27%) yang tersedia di dalam sekolah yaitu bangunan yang lebih dari satu lantai, titik evakuasi, jalur evakuasi, dan juga kotak P3k, yang tidak tersedia sebanyak 11 poin (73%) tidak tersedia.

4.3.2 Kesiapsiagaan Siswa Kelas 7 Terkait pilar 2 tentang manajemen bencana di Sekolah SMP Muhammadiyah 17 Keduyung Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan

Tabel 4.3 Karakteristik kesiapsiagaan siswa kelas 7 di tinjau dari pilar 2 tentang manajemen bencana pada bulan April.

Karakteristik Responden	Baik		Cukup		Kurang	
	F	(%)	F	(%)	F	(%)
Kelas 7 Pilar 2	0	0%	6	26,1%	17	73,9%
kelas 7 pilar 3	0	0%	9	39,1%	14	60,9%
Kelas 8 pilar 2	0	0%	6	26,1%	17	73,9%
Kelas 8 pilar 3	0	0%	9	39,1%	14	60,9%
Kelas 9 pilae 2	6	28,6%	11	52,4%	4	19,0%
Kelas 9 pilar 3	7	33,3%	8	38,1%	6	28,6%
Guru pilar 2	2	10,0%	14	70,0%	4	20,0%
Guru pilar 3	1	5,0%	15	75,0	4	20,0%
Total	16		78		80	

Berdasarkan tabel di atas hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 23 responden tingkat kesiapsiagaan terkait pilar 2 yaitu manajemen bencana di sekolah sebagian besar tergolong kesiapsiagaan kurang sebanyak 17 responden (73.9%), kesiapsiagaan cukup sebanyak 6 responden (26.1%).

4.3.3 Kesiapsiagaan Siswa Kelas 7 Terkait pilar 3 tentang Pendidikan bencana di Sekolah SMP Muhammdiyah 17 Keduyung Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan

Tabel 4.4 Karakteristik kesiapsiagaan siswa kelas 7 di tinjau dari pilar 3 terkait pilar 3 tentang pendidikan bencana pada bulan April 2018.

Karakteristik Responden	Baik		Cukup		Kurang	
	F	(%)	F	(%)	F	(%)
Kelas 7 Pilar 2	0	0%	6	26,1%	17	73,9%
kelas 7 pilar 3	0	0%	9	39,1%	14	60,9%
Kelas 8 pilar 2	0	0%	6	26,1%	17	73,9%
Kelas 8 pilar 3	0	0%	9	39,1%	14	60,9%
Kelas 9 pilae 2	6	28,6%	11	52,4%	4	19,0%
Kelas 9 pilar 3	7	33,3%	8	38,1%	6	28,6%
Guru pilar 2	2	10,0%	14	70,0%	4	20,0%
Guru pilar 3	1	5,0%	15	75,0	4	20,0%
Total	16		78		80	

Berdasarkan tabel di atas hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 23 responden tingkat kesiapsiagaan tentang pendidikan bencana sebagian besar tergolong berkesiapsiagaan kurang sebanyak 14 responden (60.9%), berkesiapsiagaan cukup sebanyak 9 responden (39.1%).

4.3.4 Kesiapsiagaan Siswa Kelas 8 Terkait pilar 2 tentang manajemen bencana di Sekolah SMP Muhammadiyah 17 Keduyung Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan

Tabel 4.5 Karakteristik kesiapsiagaan siswa kelas 8 di tinjau dari pilar 2 tentang manajemen bencana pada bulan April 2018.

Karakteristik Responden	Baik		Cukup		Kurang	
	F	(%)	F	(%)	F	(%)
Kelas 7 Pilar 2	0	0%	6	26,1%	17	73,9%
kelas 7 pilar 3	0	0%	9	39,1%	14	60,9%
Kelas 8 pilar 2	0	0%	6	26,1%	17	73,9%
Kelas 8 pilar 3	0	0%	9	39,1%	14	60,9%
Kelas 9 pilae 2	6	28,6%	11	52,4%	4	19,0%
Kelas 9 pilar 3	7	33,3%	8	38,1%	6	28,6%
Guru pilar 2	2	10,0%	14	70,0%	4	20,0%
Guru pilar 3	1	5,0%	15	75,0	4	20,0%
Total	16		78		80	

Berdasarkan tabel di atas hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 23 responden tingkat kesiapsiagaan tentang pendidikan bencana sebagian besar tergolong berkesiapsiagaan kurang sebanyak 17 responden (73.9%), berkesiapsiagaan cukup sebanyak 6 responden (26.1%).

4.3.5. Kesiapsiagaan Siswa Kelas 8 Terkait pilar 3 tentang pendidikan bencana di Sekolah SMP Muhammdiyah 17 Keduyung Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan

Tabel 4.6 Karakteristik kesiapsiagaan siswa kelas 8 di tinjau dari pilar 3 tentang pendidikan bencana di sekolah pada bulan April 2018.

Karakteristik Responden	Baik		Cukup		Kurang	
	F	(%)	F	(%)	F	(%)
Kelas 7 Pilar 2	0	0%	6	26,1%	17	73,9%
kelas 7 pilar 3	0	0%	9	39,1%	14	60,9%
Kelas 8 pilar 2	0	0%	6	26,1%	17	73,9%
Kelas 8 pilar 3	0	0%	9	39,1%	14	60,9%
Kelas 9 pilae 2	6	28,6%	11	52,4%	4	19,0%
Kelas 9 pilar 3	7	33,3%	8	38,1%	6	28,6%
Guru pilar 2	2	10,0%	14	70,0%	4	20,0%
Guru pilar 3	1	5,0%	15	75,0	4	20,0%
Total	16		78		80	

Berdasarkan tabel di atas hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 23 responden tingkat kesiapsiagaan tentang pendidikan bencana sebagian besar tergolong berkesiapsiagaan kurang sebanyak 14 responden (60.9%), berkesiapsiagaan cukup sebanyak 9 responden (39.1%).

4.3.6. Kesiapsiagaan Siswa Kelas 9 Terkait pilar 2 tentang manajemen bencana di Sekolah SMP Muhammadiyah 17 Keduyung Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan.

Tabel 4.7 Karakteristik kesiapsiagaan siswa kelas 9 di tinjau dari pilar 2 tentang manajemen bencana di sekolah pada bulan April 2018

Karakteristik Responden	Baik		Cukup		Kurang	
	F	(%)	F	(%)	F	(%)
Kelas 7 Pilar 2	0	0%	6	26,1%	17	73,9%
kelas 7 pilar 3	0	0%	9	39,1%	14	60,9%
Kelas 8 pilar 2	0	0%	6	26,1%	17	73,9%
Kelas 8 pilar 3	0	0%	9	39,1%	14	60,9%
Kelas 9 pilae 2	6	28,6%	11	52,4%	4	19,0%
Kelas 9 pilar 3	7	33,3%	8	38,1%	6	28,6%
Guru pilar 2	2	10,0%	14	70,0%	4	20,0%
Guru pilar 3	1	5,0%	15	75,0	4	20,0%
Total	16		78		80	

Berdasarkan tabel di atas hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 21 responden tingkat kesiapsiagaan tentang pendidikan bencana sebagian besar tergolong berkesiapsiagaan cukup sebanyak 11 responden (52.4%), berkesiapsiagaan baik sebanyak 6 responden (28.6%), dan berkesiapsiagaan kurang sebanyak 4 responden (19.0%).

4.3.7. Kesiapsiagaan Siswa Kelas 9 Terkait pilar 3 tentang pendidikan bencana di Sekolah SMP Muhammdiyah 17 Keduyung Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan

Tabel 4.8 Karakteristik kesiapsiagaan siswa kelas 9 di tinjau dari pilar 3 tentang pendidikan bencana di sekolah pada bulan April 2018.

Karakteristik Responden	Baik		Cukup		Kurang	
	F	(%)	F	(%)	F	(%)
Kelas 7 Pilar 2	0	0%	6	26,1%	17	73,9%
kelas 7 pilar 3	0	0%	9	39,1%	14	60,9%
Kelas 8 pilar 2	0	0%	6	26,1%	17	73,9%
Kelas 8 pilar 3	0	0%	9	39,1%	14	60,9%
Kelas 9 pilae 2	6	28,6%	11	52,4%	4	19,0%
Kelas 9 pilar 3	7	33,3%	8	38,1%	6	28,6%
Guru pilar 2	2	10,0%	14	70,0%	4	20,0%
Guru pilar 3	1	5,0%	15	75,0	4	20,0%
Total	16		78		80	

Berdasarkan tabel di atas hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 21 responden tingkat kesiapsiagaan tentang pendidikan bencana sebagian besar tergolong berkesiapsiagaan cukup sebanyak 8 responden (38.1%), berkesiapsiagaan baik sebanyak 7 responden (33.3%), dan berkesiapsiagaan kurang sebanyak 6 responden (28.6%).

4.3.8. Kesiapsiagaan Guru Terkait pilar 2 tentang Managemen bencana di Sekolah SMP Muhammdiyah 17 Keduyung Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan

Tabel 4.9 Karakteristik Guru di tinjau dari pilar 3 tentang pendidikan bencana di sekolah pada bulan April 2018.

Karakteristik Responden	Baik		Cukup		Kurang	
	F	(%)	F	(%)	F	(%)
Kelas 7 Pilar 2	0	0%	6	26,1%	17	73,9%
kelas 7 pilar 3	0	0%	9	39,1%	14	60,9%
Kelas 8 pilar 2	0	0%	6	26,1%	17	73,9%
Kelas 8 pilar 3	0	0%	9	39,1%	14	60,9%
Kelas 9 pilae 2	6	28,6%	11	52,4%	4	19,0%
Kelas 9 pilar 3	7	33,3%	8	38,1%	6	28,6%
Guru pilar 2	2	10,0%	14	70,0%	4	20,0%
Guru pilar 3	1	5,0%	15	75,0	4	20,0%
Total	16		78		80	

Berdasarkan tabel di atas hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 20 responden tingkat kesiapsiagaan tentang pendidikan bencana sebagian besar tergolong berkesiapsiagaan cukup sebanyak 14 responden (70.0%), berkesiapsiagaan baik sebanyak 2 responden (10.0%), dan berkesiapsiagaan kurang sebanyak 4 responden (20.0%).

4.3.9. Kesiapsiagaan Guru Terkait pilar 3 tentang Pendidikan bencana di Sekolah SMP Muhammdiyah 17 Keduyung Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan

Tabel 5.0 Karakteristik Guru di tinjau dari pilar 3 tentang pendidikan bencana di sekolah pada bulan April 2018.

Karakteristik Responden	Baik		Cukup		Kurang	
	F	(%)	F	(%)	F	(%)
Kelas 7 Pilar 2	0	0%	6	26,1%	17	73,9%
kelas 7 pilar 3	0	0%	9	39,1%	14	60,9%
Kelas 8 pilar 2	0	0%	6	26,1%	17	73,9%
Kelas 8 pilar 3	0	0%	9	39,1%	14	60,9%
Kelas 9 pilae 2	6	28,6%	11	52,4%	4	19,0%
Kelas 9 pilar 3	7	33,3%	8	38,1%	6	28,6%
Guru pilar 2	2	10,0%	14	70,0%	4	20,0%
Guru pilar 3	1	5,0%	15	75,0	4	20,0%
Total	16		78		80	

Berdasarkan tabel di atas hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 20 responden tingkat kesiapsiagaan tentang pendidikan bencana sebagian besar tergolong berkesiapsiagaan cukup sebanyak 15 responden (75.0%), berkesiapsiagaan baik sebanyak 1 responden (5.0%), dan berkesiapsiagaan kurang sebanyak 4 responden (20.0%).

4.4 Pembahasan Penelitian

4.4.1 Kesiapsiagaan Terkait Pilar 1 Sekolah Madrasah Aman Bencana Tentang Fasilitas dan Sarana pra Sarana Sekolah di SMP Muhammadiyah 17 Keduyung Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 15 daftar Check list untuk mengetahui fasilitas dan sarana pra sarana yang terdapat di SMP Muhammadiyah 17 Keduyung Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan, fasilitas dan sarana pra sarana yang tersedia sebanyak 4 poin atau 27%, sedangkan fasilitas yang tidak tersedia sebanyak 11 poin atau 73%, sehingga di katakana kurang dan tidak memenuhi standard dalam kesiapsiagaan fasilitas dan sarana prasarana warga sekolah SMP Muhammadiyah !7 Keduyung Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan.

Dalam Peraturan BNPB No. 4 tahun 2012 beberapa indikator sarana prasarana sekolah aman bencana disebutkan sebagai berikut:

Tidak roboh pada waktu mengalami bencana gempa,bencana banjir,bencana longsor,bencana tsunami dan dampak dari bencana letusan gunung api) sesuai dengan perencanaan,Bila terjadi gempa ringan, pada bangunan tidak mengalami kerusakan sama sekali ,Jika terjadi gempa sedang, pada bangunan boleh mengalami kerusakan pada non-struktural, tetapi tidak boleh rusak pada elemen-elemen struktural,Jika terjadi gempa besar, bangunan boleh mengalami kerusakan pada elemen non-struktural dan elemen struktural,tetapi tidak boleh runtuh, baik sebagian maupun keseluruhan, dan kerusakan yang terjadi dapat diperbaiki. Tidak runtuhnya bangunan

disebabkan bangunan bersifat daktail. Struktur bangunan gedung harus direncanakan secara detail sehingga pada kondisi pembebanan maksimum yang direncanakan, apabila jika terjadi keruntuhan kondisi strukturnya masih memungkinkan warga sekolah menyelamatkan diri. (PP 36 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan UU No. 28 Tahun 2002 Bangunan Gedung Pasal 33 Ayat 4) Tidak membahayakan warga sekolah dari benda-benda yang jatuh, termasuk bahan-bahan berbahaya, baik di dalam bangunan maupun di luar bangunan, Desain bangunan sekolah yang memberikan keleluasaan untuk mampu mengevakuasikan orang dalam keadaan darurat secara aman dari dalam bangunan ke tempat yang lebih aman (pintu cukup, terbuka keluar, jalan darurat) Terdapat jalan keluar dan akses yang aman, Sekolah memiliki tempat berkumpul yang aman, Obyek-obyek yang berbahaya di sekitar sekolah dipahami oleh murid dan guru, tempat dan rute evakuasi darurat dikenali oleh murid dan guru

Hal ini di perkuat oleh Pedoman Sekolah Madrasah Aman Bencana (PERKA BNPB 4 tahun 2012) tentang lokasi sekolah aman dari bencana di jelaskan dengan cukup baik, penentuan lokasi merupakan aspek yang mendasar dalam pemutusan gedung sekolah yang akan dibangun. Beberapa kriteria lokasi untuk sekolah aman bencana, yaitu antara lain: yang pertama Lahan untuk lokasi sekolah harus sesuai dengan peruntukannya sebagaimana diatur dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/ Kota yang diatur dengan Peraturan daerah atau rencana lain yang lebih rinci dan mengikat, yang kedua Luas lahan yang cukup untuk membangun prasarana sekolah madrasah aman bencana berupa bangunan, tempat bermain, ruang (terbuka/

tertutup) untuk berolahraga, serta memenuhi ketentuan rasio minimum luas lahan terhadap peserta didik.yang ketiga Lahan terhindar dari potensi bahaya yang mengancam kesehatan dan keselamatan warga sekolah, terhindar dari gangguan pencemaran air,dan pencemaran udara serta memiliki akses untuk penyelamatan dalam keadaan darurat.Yang ke empat Tidak terletak di lahan bekas pembuangan sampah akhir (TPA) dan daerah bekas pertambangan.Yang ke lima Jauh dari gangguan atau jaringan listrik tegangan tinggi (minimal 0,5 km).Yang ke enam Bangunan sekolah sebaiknya berada cukup jauh dari sungai dan berada di ketinggian yang aman dari bahaya banjir.Yang ke tujuh Tidak terletak di atas tebing atau kemiringan lahan tidak boleh melebihi 6% kecuali jika sudah diambil langkah besar untuk mengendalikan erosi dan mempersiapkan drainase.Yang ke delapan Peletakan bangunan sekolah agak jauh dari sempadan jalan,di mana biasanya antara bangunan dan garis sempadan jalan terdapat fasilitas sekolah,sesuai peraturan yang ada.

Standar sarana prasarana aman bencana yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yaitu Permendiknas nomor 24 tahun 2007 dan Permendiknas nomor 33 tahun 2008 mengenai lokasi lahan untuk membangun sekolah sebagaimana diacu juga dalam Perka BNPB No. 4 tahun 2012 huruf b, c, d di atas, serta kemiringan lahan, tidak berada dalam garis sempadan sungai, jalur kereta api. Kemudian lahan terhindar dari gangguan-gangguan pencemaran air (PP RI 20 tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air), dari gangguan kebisingan (Kepmeneg KLH 94/MENKLH/1992 tentang Baku Mutu Kebisingan), dari gangguan

pencemaran udara (Kemeneg KLH No. 02/MEN KLH/1988) tentang Pedoman Penetapan Baku Mutu Lingkungan.

Sehingga dapat di simpulkan kesiapsiagaan berdasarkan pilar 1 sekolah aman bencana tentang fasilitas dan sarana pra sarana yang ada di sekolah SMP Muhammadiyah 17 keduyung Laren Lamongan tergolong kurang memenuhi standard keselamatan warga sekolah. Hal ini di buktikan dengan persentase sebanyak 27% standard sekolah aman bencana yang terdapat di dalam Fasilitas sarana dan pra sarana sekolah. Dan juga hasil penelitian menunjukkan 73% yang memiliki persentase tidak adanya fasilitas sarana pra sarana standard sekolah aman bencana. Fasilitas yang pertama tidak ada yaitu pelampung atau life jacket, yang sangat penting untuk di gunakan siswa atau guru di saat banjir datang, karena dapat membantu korban tidak tenggelam pada saat banjir terjadi, yang kedua tabung pemadam kebakaran yang sangat penting jika suatu saat terjadi kebakaran baik di timbulkan dari manusia maupun arus pendek listrik, yang ketiga lokasi bangunan sekolah yang aman dari bencana.

Sedangkan lokasi SMP Muhammadiyah 17 keduyung yang sangat berpotensi tinggi terkena longsor dan banjir karena jarak antara sungai dan bangunan sekolah hanya 1 meter, yang ke empat perahu karet yang berguna untuk evakuasi siswa atau guru jika terjadi bencana banjir, yang ke lima renovasi gedung setelah terjadi bencana dapat mengembalikan fungsi gedung dan sarana pra sarana yang rusak karena bencana banjir bisa di pakai kembali untuk kegiatan belajar mengajar, yang ke enam yaitu sirine atau bell tanda bahaya atau bencana yang berguna untuk memberi tahu warga sekolah

jika sewaktu waktu terjadi bahaya atau bencana,yang ke tujuh yaitu tentang struktur atap gedung yang ringan seperti galvalum yang berfungsi jika terjadi bencana gempa maupun longsor tidak berat yang dapat lebih membahayakan warga sekolah yang ada di dalam gedung,yang ke delapan yaitu letak pintu membukanya keluar berfungsi jika terjadi bencana sewaktu waktu kita dapat langsung membuka dengan cepat tanpa terkendala menarik pintu yang dapat memperlambat proses evakuasi korban,yang ke Sembilan yaitu pekerja pembangunan gedung yang sudah di beri pelatihan pembangunan gedung aman bencana agar pekerja dapat mengerjakan struktur bangunan sesuai dengan standard bangunan aman bencana,yang ke sepuluh bahan bangunan yang di sesuaikan dengan standard komposisi aman bencana yang berfungsi agar bangunan dan sarana pra sarana tidak mudah roboh dan hancur jika terjadi bencana longsor gempa atau banjir yang terakhir fasilitas dan sarana pra sarana yang tidak tersedia di Smp muhammadiyah 17 keduyung yaitu tandu yang sangat penting untuk mengevakuasi korban atau warga sekolah yang terkena dampak bencana alam yang mengakibatkan korban tidak mampu berjalan atau tidak mampu meng evakuasi dirinya sendiri.

Fasilitas dan Sarana prasarana yang tersedia di wilayah sekolah yaitu bangunan lebih dari satu lantai untuk mengevakuasi korban bencana alam banjir ke ketinggian agar warga sekolah lebih aman,yang ke dua yaitu titik evakuasi untuk mempermudah warga sekolah tau dimana akan berkumpul ke tempat lebih aman jika terjadi bencana,yang ketiga yaitu kotak pertolongan pertama pada kecelakaan atau p3k yang sangat penting jika ada warga sekolah yang membutuhkan pengobatan dan perawatan medis sementara,yang terakhir sarana prasarana yang tersedia yaitu akses jalur

evakuasi untuk anak-anak, di sekolah tersebut sudah terdapat jalur evakuasi yang sudah di beri tanda kemana warga sekolah harus menyelamatkan diri jika sewaktu waktu terjadi bencana alam.

4.4.2 Kesiapsiagaan Terkait Pilar 2 Sekolah Madrasah Aman Bencana Tentang Managemen bencana Di Sekolah SMP Muhammadiyah 17 Keduyung, Kecamatan Laren, Kabupaten Lamongan

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 87 responden tingkat Kesiapsiagaan Pilar 2 tentang managemen bencana di sekolah sebagian besar tergolong Kurang sebanyak 17 (73,3%) responden kelas 7, kelas 8 sebanyak 17 responden (73,9%) ,kelas 9 sebanyak 4 responden(19,0%),Guru sebanyak 4 responden (20,0%).

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 87 responden tingkat Kesiapsiagaan Pilar 2 tentang Managemen Bencana di sekolah sebagian besar tergolong Cukup sebanyak 6 (26,1%) responden kelas 7, kelas 8 sebanyak 6 responden (26,1%) ,kelas 9 sebanyak 11 responden(52,4%),Guru sebanyak 14 responden (70,0%).

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 87 responden tingkat Kesiapsiagaan Pilar 2 tentang Managemen Bencana di sekolah sebagian besar tergolong Baik sebanyak 6 (28,6%) responden kelas 9,Guru sebanyak 2 responden (10,0%).

Menurut Undang-Undang Nomor 24 tahun 2010 Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan

kelompok rentan, pengurusan pengungsi, serta pemulihan darurat. Manajemen Bencana yang ada di Sekolah merupakan proses pengkajian yang kemudian diiringi oleh perencanaan pada perlindungan fisik, perencanaan pengembangan kapasitas dalam melakukan respon atau tanggap darurat, dan perencanaan kesinambungan pendidikan, di tingkat sekolah masing-masing sampai dengan otoritas pendidikan di semua tingkatan, baik kabupaten/ kota, provinsi hingga nasional. Manajemen Bencana yang ada di Sekolah ditentukan melalui pihak-pihak berwenang di sektor pendidikan tingkat nasional, provinsi, kabupaten/ kota dan di tingkat komunitas sekolah (termasuk siswa ,guru dan orang tua), bekerja sama dengan mitra yang ada di bidang manajemen bencana, untuk ikut menjaga lingkungan belajar yang aman serta merencanakan kesinambungan pendidikan baik itu di masa yang tidak ada bencana maupun di saat terjadi bencana, dan setelah terjadi bencana sesuai dengan standar internasional.

Maka dapat di simpulkan dari 87 responden sebagian besar kesiapsiagaan masyarakat belum siap dan mengerti tentang pentingnya manajemen kebencanaan di sekolah. Hal ini ditunjukkan dengan sebanyak 87 responden sekitar 46 responden berkesiapsiagaan kurang, di bandingkan yang berkesiapsiagaan cukup dan baik. Karena sebagian besar warga sekolah Smp Muhammadiyah 17 keduyung yang rata rata tidak pernah mendapat pelatihan atau pengetahuan tentang manajemen bencana di sekolah, Sedangkan sebelum bencana banjir terjadi pemerintah setempat telah memberi himbauan terhadap warga sekolah agar waspada terhadap bencana banjir yang sewaktu waktu terjadi, namun himbaun tersebut banyak yang tidak dimengerti

oleh warga sekolah karena pengetahuan dan pemahaman tentang pentingnya manajemen bencana di sekolah yang kurang.

4.4.3 Kesiapsiagaan Terkait Pilar 3 Sekolah Madrasah Aman Bencana Tentang Pendidikan Pengurangan Resiko Bencana Di SMP Muhammdiyah 17 keduyung Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 87 responden tingkat Kesiapsiagaan Pilar 3 tentang pendidikan pengurangan resiko bencana di sekolah sebagian besar tergolong Kurang sebanyak 14 (60,9%) responden kelas 7, kelas 8 sebanyak 14 responden (60,9%) ,kelas 9 sebanyak 6 responden(28,6%),Guru sebanyak 4 responden (20,0%).

. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 87 responden tingkat Kesiapsiagaan Pilar 3 tentang pendidikan pengurangan resiko bencana di sekolah sebagian besar tergolong Cukup sebanyak 9 (39,1%) responden kelas 7, kelas 8 sebanyak 9 responden (39,1%) ,kelas 9 sebanyak 8 responden(38,1%),Guru sebanyak 15 responden (75,0%).

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 87 responden tingkat Kesiapsiagaan Pilar 3 tentang pendidikan pengurangan resiko bencana di sekolah sebagian besar tergolong baik sebanyak 7 (33,3%) responden kelas 9, Guru sebanyak 1 responden (5,0%).

Menurut Bloom dalam Notoatmodjo (2007) tingkat pendidikan akan berpengaruh dalam memberi respon terhadap suatu yang datang dari luar. Orang yang

berpendidikan tinggi akan memberi respon yang lebih rasional terhadap informasi yang datang, akan berpikir sejauh mana keuntungan yang mungkin akan mereka peroleh dari gagasan tersebut.

Dalam UU No 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan bahwa pendidikan nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk perilaku serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk meningkatnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang bertanggung jawab. Dalam rangka memenuhi fungsi dan tujuan Pendidikan Nasional tersebut, perlu dilakukan analisis pada sektor pendidikan, yang berada pada tatanan kebijakan baik lokal maupun nasional, yang dilakukan secara teratur setiap dua tahun. Analisis sektor pendidikan ini terdiri dari yang pertama Konteks demografis, informasi perkiraan populasi, teragregasi berdasarkan tingkatan pendidikan dari Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sampai dengan Pendidikan Tinggi.

Yang kedua Konteks sosio ekonomi dan politik yaitu penjelasan situasi kerentanan ekonomi, politik, sosial dan lingkungan, yang berdampak pada sektor pendidikan. Yang ketiga Konteks kebijakan sektor pendidikan dan manajemen; penjelasan informasi struktur dan peran/ tanggung jawab dari masing-masing pemangku kebijakan yang terkait dengan sektor pendidikan, informasi mengenai kinerja dan pencapaian sektor pendidikan wilayah seperti tingkat matrikulasi, literasi, dan pengukuran lainnya serta informasi mengenai sistem dan mekanisme pengambilan keputusan di lingkungan

sekolah, lokal (daerah) maupun nasional. Yang ke empat Analisis multi ancaman dan risiko analisis ancaman yang perlu dilakukan adalah analisis ancaman akibat perilaku manusia seperti konflik sosial, konflik bersenjata ataupun konflik yurisdiksi wilayah dan analisis ancaman akibat kondisi alami seperti bencana gempa bumi, banjir, bencana angin puting beliung, bencana badai dan ancaman alami lainnya.

Perencanaan keberlanjutan pendidikan dan manajemen sekolah berbasis manajemen bencana; jenis pendidikan dan pelatihan yang tersedia untuk guru dan karyawan/tenaga pengajar lain mengenai manajemen bencana di wilayah sekolah serta prosedur standar operasional yang tersedia pada proses evakuasi, penampungan, dan pertemuan keluarga (reunifikasi) yang hilang akibat terjadi bencana serta ruang lingkup dan kualitas simulasi bencana yang terdapat di sekolah

Hal ini di perkuat oleh pernyataan Hyogo Framework for Action (HFA) maupun UU nomor 24 tahun 2007 (pasal 26) menyatakan prioritas PRB pengurangan risiko bencana perlu dimasukkan ke dalam sektor pendidikan, di mana setiap orang berhak mendapatkan pendidikan, pelatihan, dan keterampilan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, baik dalam situasi tidak terjadi bencana maupun situasi terdapat potensi bencana. Melalui pendidikan dan pelatihan penanggulangan bencana baik secara formal dan non formal, diharapkan budaya aman dan kesiapsiagaan menghadapi bencana dapat terus dikembangkan. Pendidikan bencana untuk semua kalangan termasuk anak-anak adalah suatu keharusan, karena anak-anak adalah kelompok yang paling risiko tinggi selama terjadi bencana, terutama yang sedang berada di wilayah sekolah pada saat berlangsungnya kejadian bencana. Dalam

pelaksanaan pendidikan bencana, pihak yang berperan antara lain; pihak sekolah itu sendiri, orangtua siswa dan komite sekolah, serta pemerintah

Untuk memulai pendidikan siaga bencana di sekolah, idealnya setiap sekolah melakukan serangkaian proses kegiatan sebagai berikut, Yang pertama Mengikuti pelatihan atau pembekalan tentang penanggulangan bencana dan pengurangan risiko bencana, yang kedua Mengenali risiko bencana di sekitar lokasi sekolah.

Merencanakan integrasi kurikulum ke dalam Rencana Belajar Tahunan, Bulanan, Mingguan dan Harian dan pemantauan hasil belajar dengan cara: Mengintegrasikan materi PRB ke dalam bahan belajar, Mengintegrasikan materi PRB ke dalam mata pelajaran pokok dan muatan local, Mengintegrasikan materi PRB ke dalam program pengembangan diri, Menyelenggarakan mata pelajaran Pendidikan PRB Memadukan pendidikan kesiapsiagaan bencana ke dalam kebijakan sekolah.

Maka dapat di simpulkan bahwa dari 87 responden sebagian besar kesiapsiagaan masyarakat belum siap dan mengerti tentang pentingnya pendidikan pengurangan resiko bencana di sekolah. Hal ini ditunjukkan dengan sebanyak 87 responden sekitar 46 responden berkesiapsiagaan kurang, di bandingkan yang berkesiapsiagaan cukup dan baik. di sebabkan sebagian besar warga sekolah belum pernah terpapar pendidikan tentang penanggulangan bencana baik siswa maupun guru, padahal pendidikan penanggulangan bencana dapat di masukan ke dalam kegiatan ekstrakurikuler baik tapak suci, hisbul waton maupun kegiatan lainnya yang ada di dalam lingkungan sekolah.